



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTUR WILAYAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIFAI  
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal

RAZILU  
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Inspektur Wilayah I

AHMAD RIFAI  
NIP. 19621213 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTUR WILAYAH I DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-1 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-2 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	92 %
	4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	92 %
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	6 %
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	66,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
SK-1	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
SK-2	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	82 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Anggaran
1.	<b>Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I</b>	<b>Rp.4.055.492.000,-</b>
	Sasaran Kegiatan (SK-1) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Rp. 3.012.732.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-2) : Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp. 1.042.760.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Revisi ke 7 Th.2021

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal



RAZILU  
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Inspektur Wilayah I



AHMAD RIFAI  
NIP. 19621213 198603 1 001

Ket :

SP-1 diturunkan ke SK-1

SP-2 dan SP-3 diturunkan ke SK-2



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telp. (021) 5253871, 5253004, Faksimili (021)-5252975  
Laman : <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail :  
[itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

**BERITA ACARA**

NOMOR : ITJ.1.UM.01.01-2865

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami masing-masing :

Ahmad Rifai NIP.196212131986031001 Inspektur Wilayah I;

**Selaku pihak pertama,**

yang menugaskan pejabat/pegawai dari Inspektorat Wilayah I yang namanya terlampir dalam Daftar Hadir Kegiatan, untuk mengikuti kegiatan Pembahasan ke-2 (dua) bersama dengan Bagian Program, Humas dan Pelaporan tentang usulan Perubahan IKU-IKK-PK Tahun 2021 – 2024 pada tanggal 12 Agustus 2021:

dan

Khairuddin NIP.196202011990031001 Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

**Selaku pihak Kedua,**

yang menugaskan pejabat/pegawai dari Bagian Program, Humas dan Pelaporan yang namanya terlampir dalam Daftar Hadir Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan Pembahasan ke-2 (dua) bersama dengan Inspektorat Wilayah I s.d VI tentang usulan Perubahan IKU-IKK-PK Tahun 2021 – 2024 pada tanggal 12 Agustus 2021:

mengetahui bahwa pejabat/pegawai yang namanya terlampir dalam Daftar Hadir Kegiatan telah:

- a. Melaksanakan pembahasan ke-2 (dua) bersama antara Bagian Program, Humas dan pelaporan dengan Inspektorat Wilayah I s.d VI tentang usulan Perubahan IKU-IKK-PK pada tanggal 12 Agustus 2021 secara *daring* berdasarkan Nota Dinas Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1.UM.01.01- 2815 /VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Hal Undangan Pembahasan Tahap 2 Usulan Perubahan Target IKU-IKK-PK Tahun 2021 – 2024 (Nota dinas dan daftar hadir peserta terlampir);
- b. Menyepakati bersama usulan perubahan target IKU-IKK-PK yang semula telah ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM serta RENSTRA Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, dan dalam dokumen lain yang terkait dengan perencanaan program-kegiatan-anggaran Inspektorat Jenderal, menjadi sebagaimana usulan perubahan target yang tertera dalam Lampiran Berita Acara ini.

Untuk selanjutnya data yang tertera dalam Berita Acara ini akan menjadi dasar mengusulkan *Trilateral Meeting* dengan :

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk memohon persetujuan perubahan dalam RENJA (aplikasi KRISNA dan aplikasi Monev Kinerja RKP-Bappenas);

- b. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, untuk mohon persetujuan perubahan dalam RENJA (aplikasi KRISNA, aplikasi Monev Kinerja Anggaran SMART, perubahan Informasi Kinerja dalam DIPA-RKAKL ITJEN);
- c. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, untuk mohon persetujuan perubahan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait target ITJEN Tahun 2021 s.d 2024 dan aplikasi e-performance Kemenkumham.

Dan hasil dari *Trilateral Meeting* nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan :

- a. Revisi RENSTRA Inspektorat Jenderal, khususnya perubahan target indikator Tahun 2021 – 2024;
- b. Revisi Surat Keputusan Inspektur Jenderal No.ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 Hal Penetapan IKU-IKK dan formulasi hitungan capaian target;
- c. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (yang akan menjadi dasar dalam penyusunan New SKP sesuai PermenpanRB No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Jakarta, 12 Agustus 2021

PIHAK KEDUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Khairuddin

NIP.196202011990031001



PIHAK PERTAMA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ahmad Rifai

NIP.196212131986031001



## Lampiran Berita Acara Usulan Perubahan IKU-IKK-PK

Nomor : ITJ.1.UM.01.01-2865

Tanggal : 16 Agustus 2021

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / PERJANJIAN KINERJA		SEMULA					MENJADI				ALASAN / PERTIMBANGAN PERUBAHAN TARGET
				TARGET EXISTING RENSTRA 2020-2024					TARGET USULAN PERUBAHAN (AGUSTUS)				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SK-11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Cosulting	IKK-1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	ITWIL I ITWIL II ITWIL III ITWIL IV ITWIL V ITWIL VI	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 4 Terdefinisi	TIDAK DI RUBAH				Target masih fleksibel dan dapat dicapai oleh ITJEN
SK-12	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	IKK-2	Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah	ITWIL I ITWIL II ITWIL III ITWIL IV ITWIL V ITWIL VI	52%	56%	60%	62%	TIDAK DI RUBAH				Target masih fleksibel dan dapat dicapai oleh ITWIL I, II, III, IV, V dan VI

SK-13	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang partisipatif dan professional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di Lingkungan Kemenkumham	IKK-3	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait pengembalian ke kas Negara di Lingkungan Inspektorat Wilayah	ITWIL I	62%	65%	68%	70%	TIDAK DI RUBAH				Target masih fleksibel dan dapat dicapai oleh ITWIL I, II, III
				ITWIL II									
				ITWIL III									
				ITWIL IV	62%	65%	68%	70%	8%	9%	10%	11%	Target diturunkan menjadi 8%, 9%, 10% dan 11% dengan pertimbangan masih terdapat temuan kerugian negara pada satker Setjen sebesar 4,6M (kasus SPBU Tahun 2014 di Tangerang) yang sedang dalam proses pembahasan penyelesaian antara Setjen dengan pihak ketiga.
				ITWIL V	62%	65%	68%	70%	60%	61%	62%	63%	Terdapat temuan terkait dengan Audit PNBP DJKI Th 2019, yaitu pengembalian ke kas negara berasal dari pihak ke 3, sebesar Rp 325.091.705.500 dan dikarenakan nilai pengembalian yang cukup besar sehingga proses pengembalian tidak dapat dilakukan secara langsung.
				ITWIL VI	62%	65%	68%	70%	TIDAK DI RUBAH				Target masih fleksibel dan dapat dicapai oleh ITWIL VI





